



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 13 Agustus 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pengumuman dan perubahan Propemperda Tahun 2025

### Terpilih Secara Aklamasi, Adam Rusydi Ditugasi Adies Kadir Siapkan Calon Eksekutif untuk Partai Golkar Sidoarjo



### Dua Hari, Tiga Lahan Hangus Imbas Pembakaran Sampah Liar

SIDOARJO - Dalam dua hari, sejak Senin (11/8) hingga kemarin (12/8), sebanyak tiga lahan terbakar. Penyebabnya, sama-sama imbas adanya orang pembakar sampah dan merembet ke lahan kosong. Kemarin (12/8), lahan kosong di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, terbakar. Luasnya 500 meter. Sebelumnya, di Krian dan Waru, Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yuli Wisnu mengatakan, kebakaran lahan tersebut diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah sembarangan. "Kami menduga ada aktivitas warga, di sisi lain angin dan musim kemarau membuat daun kering cepat terbakar," katanya. Sedangkan pada Senin (11/8), api menghancurkan lahan bambu di Desa Tempel Krian. Api cepat membesar karena banyak batang kayu yang kering. Pada Senin (11/8) malam, kebakaran juga melanda lahan kosong di Pondok Tjandra, Waru. "Kondisi musim kemarau memang sering terjadi kebakaran lahan, kami imbu warga agar tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan," ujarnya. (eza/uzi)

### Bus Trans Jatim 2 Hari Gratis

Berlaku di Semua Koridor Sambut HUT Kemerdekaan RI

Gubernur Kholidah Indar Purwaningrum mengapresiasi bus Trans Jatim yang sukses menggelar kampanye bus gratis selama dua hari. "Ini adalah inisiatif dari Bus Trans Jatim yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transportasi publik yang ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat." (DPRD Sidoarjo)



Bus Trans Jatim yang sukses menggelar kampanye bus gratis selama dua hari. "Ini adalah inisiatif dari Bus Trans Jatim yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transportasi publik yang ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat." (DPRD Sidoarjo)

### Operasional TPST Pekarungan Terkendala Anggaran Peralatan

SIDOARJO - Operasional tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Pekarungan yang mangkrak terkendala anggaran. Camat Sukodono Moch. Solichin sudah meminta pihak desa agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk cari solusi. Solichin mengatakan, ke depan pihak desa sudah ada rencana untuk mengaktifkan kembali TPST tersebut. Sehingga bisa kembali beroperasi. "Selama ini mereka mengaku terkendala pembiayaan sarpras dan SDM pengelola TPST," paparnya. Sebelum TPST beroperasi lagi, pihak Kecamatan Sukodono akan berpatroli untuk mengangkut sampah liar di Pekarungan. "Tim nanti mengangkut seminggu sekali, sambil kami pasang larangan dan peringatan an untuk tidak buang sampah liar di situ," paparnya. Saat ini, sampah yang menumpuk di jalan sekitar TPST tersebut sudah dibersihkan. "Dari pengamatan kami kebanyakan yang membuang adalah warga luar desa, karena itu jalur alternatif ke Surabaya," ujarnya. (eza/uzi)

PENGUMUMAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENYISIRAN DAN PEMBERSIHAN ALIRAN AIR DI DAERAH DASAR WILAYAH KOTA SIDOARJO. (DPRD Sidoarjo)

### SMP IT Insan Kamil Sidoarjo Siap Menjadi Sekolah Adiwiyata

SIDOARJO, Bhirawa - Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Insan Kamil Sidoarjo siap untuk menjadi sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo. Selain (12/8) kemarin, tim penilai Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, datang ke sekolah yang berada di Jalan Pematang RT 12, RW 02 Kelurahan Sekardarung Kecamatan Sidoarjo. Kepala SMP IT Insan Kamil, Fauzan Rohman Spt I, Cr, mengatakan semua jajaran di SMP IT Insan Kamil Sidoarjo menyatakan siap menjadi dan akan melaksanakan program-program sekolah Adiwiyata. "Karena program ini jelas bermanfaat bagi sekolah maupun para semua siswa," komentar Fauzan Rohman. Tim penilai sekolah Adiwiyata dari DLHK Kabupaten Sidoarjo, kemarin, mencocokkan dokumen program sekolah Adiwiyata yang

### Gerak Jalan Meriahkan HUT RI ke-80 di Tanggulangin Berlangsung Meriah



### 10 Rumah di Buduran Dapat Jamban Sehat Gratis

SIDOARJO - Sebanyak 0,07 persen rumah di Sidoarjo belum dilengkapi jamban sehat. Meskipun, Sidoarjo sudah menyandang Kabupaten Kota Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS). Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) menekan angka tersebut lewat bantuan dari organisasi kesehatan dan CSR. Kemarin (12/8) misalnya, Sebanyak 10 rumah di Buduran dipasang jamban sehat dari Rotary Club Surabaya Selatan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Lakhsmle Herawati mengatakan, sebagai upaya mengurangi rumah yang belum memiliki jamban sehat, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai program bantuan. "Hari ini (kemarin) ada 10 rumah di Buduran mendapat bantuan. Kepala Dinkes Sidoarjo Lakhsmle Herawati (dua dari bantuan) memeriksa kuantitas jamban yang telah terpasang di rumah warga Sivalanpanji kemarin (12/8).



MANGKRAK: TPST Pekarungan di Kecamatan Sukodono sudah tidak beroperasi kemarin (12/8). Imbasnya, banyak sampah dibuang sembarangan.

## Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## **DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pengumuman dan perubahan Propemperda Tahun 2025**



Sidoarjo | Radar-today – DPRD Sidoarjo kembali gelar rapat paripurna, Senin (11/8/2025) di ruang rapat DPRD Sidoarjo.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo masa persidangan ketiga Tahun sidang 2025 dengan pembacaan rancangan surat keputusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan atas surat keputusan DPRD Sidoarjo nomor 36 tahun 2024 tentang program Perda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Anggota DPRD Forkopimda, para Komandan kepala Kesatuan TNI dan Polri, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris



daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, serta kepala instansi vertikal direktur BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu, Rektor Perguruan tinggi dan pimpinan partai politik serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2025. Ia menyampaikan agenda sidang hari ini adalah pengumuman dan penetapan perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Sidoarjo pada (5/8/2025) yang ditindaklanjuti dengan berita acara rapat Badan Musyawarah DPRD Sidoarjo dengan acara sebagai berikut, yakni

Pembacaan surat masuk dan Pembacaan rancangan surat keputusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan atas surat keputusan DPRD Sidoarjo nomor 36 tahun 2004 tentang propemperda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, serta Pengumuman dan penetapan perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Dan dilanjut

Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama.

Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai jumlah anggota dewan yang hadir dalam persidangan tersebut sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut sesuai pasal 101 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD Sidoarjo nomor 1 tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan DPRD Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD Sidoarjo nomor 1 tahun 2018 tentang tatib DPRD Sidoarjo telah memenuhi kuorum.

Hari Sucahyono, SH, M.Si. Sekretaris DPRD Sidoarjo telah membacakan surat masuk Bupati Sidoarjo tentang

1. Perihal usulan perubahan propemperda tahun 2025.
2. Surat Bupati Sidoarjo perihal permohonan perubahan propemperda tahun 2025
3. Surat Bupati Sidoarjo perihal penyampaian usulan perubahan propemperda tahun 2025.

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 36 tahun 2024 tentang perubahan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo memutuskan,





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

1. Perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.
2. Daftar perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum satu tercantum dalam perancang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

Adapun daftar usulan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Raperda penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pengusul Dinas Perhubungan
2. Raperda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pengusul satpol PP
3. Raperda perubahan Raperda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengusul BPPD
4. Raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2045 pengusul Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata
5. Raperda Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2024 pengusul bpkad
6. raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten anggaran 2026 pengusul bpkad.
7. Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 pengusul bpkad
8. Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 pengusul BAPPEDA
9. Raperda pelaksanaan sekolah dari Madrasah pengusul bagian Kesra



10. Raperda penyelenggaraan Pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan pengusul Disnaker
11. Raperda perubahan kedua tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo pengusul bagian Organisasi
12. Raperda perusahaan perseorangan daerah bank perekonomian rakyat Delta Artha pengusul bagian Perekonomian
13. Raperda penyertaan modal perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat Delta Artha pengusul bagian Perekonomian
14. Raperda pencabutan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan pengusul Dinas P2CKTR.

Sedangkan daftar usulan DPRD Kabupaten Sidoarjo, yakni

1. Raperda perubahan atas kerja nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan pengusul komisi D
2. Raperda fasilitasi pengembangan Pesantren, pengusul komisi D
3. Ada penyelenggaraan kesehatan hewan, pengusul komisi B.

Propemperda 2025 ditetapkan jadi surat keputusan DPRD Sidoarjo. Dengan begitu telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo (dihadiri Wakil Bupati) Sidoarjo terhadap perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

"Dari hasil rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan penetapan perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, semoga pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik teratur dan tetap memperhatikan skala prioritas dalam dinamika pembangunan Kabupaten Sidoarjo" kata Aba Nasih (rin)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Legislasi 2025 Dimulai, DPRD Sidoarjo Tetapkan 17 Raperda Prioritas



RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Legislasi 2025 Dimulai, DPRD Sidoarjo

Tetapkan 17 Raperda Prioritas

**HALOPOS.ID|SIDOARJO – Dari aturan pengujian kendaraan bermotor hingga pencabutan izin mendirikan bangunan, DPRD Kabupaten Sidoarjo resmi mengunci daftar 17 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan menjadi prioritas pembahasan tahun ini. Penetapan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 11 Agustus 2025, disaksikan jajaran eksekutif, legislatif, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).**

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, sekaligus mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 yang sebelumnya tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 36 Tahun 2024.

"Pembahasan Raperda harus memperhatikan skala prioritas dan dinamika pembangunan," kata Abdillah,

Rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 ini diawali pembacaan surat masuk, dilanjutkan rancangan surat keputusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan Propemperda. Sekretaris DPRD Sidoarjo, Hari Suchayono, membacakan tiga surat resmi dari Bupati Sidoarjo yang menjadi dasar perubahan tersebut.

Surat-surat bertanggal 24 April, 5 Juni, dan 28 Juli 2025 itu memuat daftar Raperda yang perlu dimasukkan atau diubah. Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah, rapat dihadiri 36 anggota dewan, memenuhi syarat kuorum sesuai Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2018 yang telah diperbarui pada 2024.



Propemperda disahkan melalui penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili Wakil Bupati Hi. Mimik Idayana.

Perubahan Propemperda 2025 mencakup 17 rancangan peraturan daerah, terdiri dari usulan eksekutif dan legislatif.

Dari pemerintah daerah, topik strategis yang masuk daftar antara lain:

1. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan)
2. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Satpol PP)
3. Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPD)
4. Rencana induk pembangunan kepariwisataan 2025–2045 (Disporapar)
5. Pertanggungjawaban APBD 2024 (BPKAD)
6. APBD 2026 (BPKAD)
7. Perubahan APBD 2025 (BPKAD)
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 (Bappeda)
9. Penyelenggaraan sekolah dari madrasah (Bagian Kesra)
10. Pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan (Disnaker)
11. Perubahan susunan perangkat daerah (Bagian Organisasi)
12. Pembentukan perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha (Bagian Perekonomian)
13. Penyertaan modal Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha (Bagian Perekonomian)
14. Pencabutan Perda IMB Nomor 4 Tahun 2012 (Dinas P2CKTR)

Sementara dari DPRD, tiga usulan yang masuk daftar yakni:

1. Perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan (Komisi D)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Ketua Komisi A Sidoarjo Ingatkan Pejabat: Jangan Main-Main Dengan Regulasi



Foto : Ketua Komisi A, H. Rizza Ali Faizin

**SIDOARJOSATU.COM** — Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar berhati-hati menialankan tugas dan tidak bermain-main dengan regulasi. Peringatan ini menyusul penahanan dua mantan kepala dinas dalam kasus dugaan korupsi Rusunawa Tambaksawah, Waru yang merugikan negara hingga Rp.9,7 miliar.

Kedua pejabat yang ditahan adalah Ir. Sulaksono, mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cipta Karya) untuk periode 2008–2011 dan 2018–2021, serta Dwidio Prawito yang menjabat di periode 2012–2014 dan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau sudah berani menerima jabatan, harus siap melakukan pengawasan yang intensif. Jangan sampai pembiaran terjadi, karena itu juga bisa dijerat hukum,” kata Rizza Ali Faizin, Senin (11/8/2025).



Anggota Fraksi PKB tersebut menilai lemahnya pengawasan menjadi celah terjadinya penyimpangan. Ia menekankan perlunya edukasi antikorupsi bagi pejabat eksekutif hingga kepala desa, mengingat besarnya dana desa. Komisi A bersama Inspektorat akan menyiapkan pendampingan ke desa-desa mulai 2026.

"Tentunya ini menjadi catatan penting agar para pejabat lebih berhati-hati untuk kedepannya," tegasnya.

Ia juga menyoroti anggaran yang nantinya akan dikelola oleh kecamatan. Tahun 2025 rata-rata mencapai Rp250 juta, dan pada 2026 melonjak hingga Rp1,3–Rp1,9 miliar per kecamatan.

"Anggaran sebesar itu harus tepat sasaran. Kalau tidak diserap, emam. Kalau salah sasaran, akan berhadapan dengan hukum," tandasnya.

Kejari Sidoarjo menahan Ir. Sulaksono dan Dwidio Prawito atas dugaan korupsi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dengan kerugian negara Rp9,7 miliar. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap empat mantan kepala dinas Perkim Cipta Karya periode 2008–2022.

Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Jhon Franky Yanafia Ariandi, menyebut hanya dua orang yang ditahan karena dinilai paling bertanggung jawab.

"Hari ini kami periksa tiga orang yaitu S (Sulaksono), DP (Dwidio Prawito), dan ABT (Agoes Boedi Tiahiono). Sedangkan HS (Heri Soesanto) tidak hadir karena alasan kesehatan," ujar Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Jhon Franky, kepada wartawan.

Franky menyebutkan, pemeriksaan dilakukan kepada empat mantan kepala dinas yang menjabat dari 2008 hingga 2022, yakni Sulaksono, Dwidio Prawito, Ir. Agoes Boedi Tiahiono (2015–2017), dan Dr. Heri Soesanto (Plt. 2022). Namun, hanya dua nama yang langsung ditahan karena dinilai paling bertanggung jawab dalam kerugian negara.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Propemperda 2025 Sidoarjo Disahkan: Langkah Strategis untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Terarah

*DPRD Sidoarjo Tetapkan Prioritas Peraturan Daerah Demi Kemajuan Kabupaten*



Ekspresi optimisme: Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Suparno, SH., MH., H. Kayan, SH., dan Warih Andono, setelah menandatangani dokumen penting bagi Kabupaten Sidoarjo. /Dicky Pramono, radarkeadilan.com

**Sidoarjo, Radar Keadilan** – Di tengah semangat untuk terus memajukan Kabupaten Sidoarjo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo telah mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 sebagai Surat Keputusan DPRD.

Keputusan penting ini menandai langkah strategis dalam merencanakan dan menyusun peraturan daerah (Perda) yang akan menjadi landasan hukum bagi berbagai aspek pembangunan di Sidoarjo.



Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (11/8/2025), menjadi wadah untuk membahas dan menetapkan program-program pembangunan yang berkelanjutan. /Dicky Pramono, radarkeadilan.com

**Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, yang digelar pada Senin, 11 Agustus 2025, menjadi momen krusial dalam penetapan Propemperda ini.**



**Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, anggota DPRD, Forkopimda, serta perwakilan dari TNI, Polri, MUI, pejabat daerah, BUMN, BUMD, KPU, Bawaslu, rektor perguruan tinggi, dan pimpinan partai politik.**

## **Proses Pengambilan Keputusan**

**Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, memimpin langsung rapat paripurna yang membahas pengumuman dan penetapan perubahan Propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Sidoarjo pada 5 Agustus 2025.**



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD, Suparno, SH., MH., dan Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, hadir dalam rapat penting untuk kemajuan daerah. / Dicky Pramono, radarkeadilan.com

***“Penetapan Propemperda ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan peraturan daerah yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” ujar Abdillah Nasih dalam sambutannya.***

**Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo melaporkan bahwa rapat paripurna telah memenuhi kuorum dengan kehadiran 36 anggota dewan, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024.**

## **Daftar Usulan Peraturan Daerah**

Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Suparno, SH., MH., H. Kavan, SH., dan Warih Andono, dalam momen penandatanganan yang penting bagi Kabupaten Sidoarjo. / Dicky Pramono, radarkeadilan.com

**Dalam Propemperda 2025, terdapat sejumlah usulan peraturan daerah yang menjadi prioritas, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Sidoarjo. Beberapa di antaranya meliputi:**

### **Usulan Pemerintah Daerah:**





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

1. **Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor: Diusulkan oleh Dinas Perhubungan.**
2. **Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Diusulkan oleh Satpol PP.**
3. **Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Diusulkan oleh BPPD.**
4. **Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045: Diusulkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.**
5. **Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024: Diusulkan oleh BPKAD.**
6. **Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Anggaran 2026: Diusulkan oleh BPKAD.**
7. **Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025: Diusulkan oleh BPKAD.**
8. **Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029: Diusulkan oleh BAPPEDA.**
9. **Raperda Pelaksanaan Sekolah dari Madrasah: Diusulkan oleh Bagian Kesra.**
10. **Raperda Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan: Diusulkan oleh Disnaker.**
11. **Raperda Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo: Diusulkan oleh Bagian Organisasi.**
12. **Raperda Perusahaan Perseorangan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha: Diusulkan oleh Bagian Perekonomian.**
13. **Raperda Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha: Diusulkan oleh Bagian Perekonomian.**
14. **Raperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan: Diusulkan oleh Dinas P2CKTR.**

## Usulan DPRD Kabupaten Sidoarjo:

1. **Raperda Perubahan atas Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan: Diusulkan oleh Komisi D.**
2. **Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren: Diusulkan oleh Komisi D.**
3. **Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Hewan: Diusulkan oleh Komisi B.**

## Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025

Pada rapat paripurna yang sama, DPRD Sidoarjo juga membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025.

Fraksi PKB menyoroti kenaikan pendapatan daerah menjadi Rp5,431 triliun, namun juga menyoroti penurunan pendapatan dari sektor retribusi daerah. Wakil Ketua DPRD



***“Kami meminta Pemkab mencari langkah efektif untuk mengoptimalkan sektor retribusi daerah,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Abud Asyrofi.***

**Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan meminta perbaikan sistem perencanaan serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran.**

***“Kami meminta pengawasan pemanfaatan kios diperketat agar tidak ada yang kosong sehingga potensi pendapatan daerah bisa meningkat,” kata Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama.***

**Dengan ditetapkannya Propemperda 2025, diharapkan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik, teratur, dan tetap memperhatikan skala prioritas dalam dinamika pembangunan Kabupaten Sidoarjo.**

**Rapat paripurna DPRD Sidoarjo masa persidangan ketiga tahun 2025 ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih, mengakhiri serangkaian agenda penting bagi kemajuan daerah.**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## **Terpilih Secara Aklamasi, Adam Rusydi Ditugasi Adies Kadir Siapkan Calon Eksekutif untuk Partai Golkar Sidoarjo**



Sidoarjo (republikjatim.com) - Kendati masih berusia muda, Adam Rusydi terbukti sangat piawai dalam memainkan peran politik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya menjadi pendatang baru dalam kontestasi dalam saat Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo ke X Tahun 2020 lalu, hingga terpilih dan memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo hingga Tahun 2025.

Kali ini, Adam Rusydi juga kembali terpilih secara aklamasi dalam Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo ke XI yang dihelat di Aston Hotel, Sidoarjo. Bahkan dari 18 Pengurus Kecamatan (PK) seluruhnya mendukung pencalonan Adam Rusydi menjadi calon tunggal dalam kontestasi Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo kali ini.

Begitu pula para pengurus DPD Partai Golkar dan lima anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Sidoarjo, hampir 100 persen mendukung Adam Rusydi menjadi calon tunggal dalam Musda yang dihadiri para tokoh politik lokal, regional hingga tingkat nasional itu.

Dengan terpilihnya kembali Adam Rusydi dalam Musda itu, berarti Adam Rusydi memimpin DPD Kabupaten Sidoarjo untuk periode kedua dengan masa jabatan Tahun 2025 hingga 2030 mendatang.

Dalam Musda ke XI DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo ini juga dihadiri para Ketua Partai di Sidoarjo. Diantaranya Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdillah Nasih, Ketua DPD PAN Emir Firdaus, Ketua DPD Partai Nasdem M Zakaria Dimas Pratama, Ketua DPC PPP Sholikan Arief dan Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo. Selain itu, acara Musda ini juga dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Serta dihadiri sejumlah perwakilan Forkopimda Sidoarjo lainnya.

Sedangkan dari Partai Golkar juga hadir Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Partai Golkar Warih Andono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo M dan seluruh anggota fraksi Golkar. Selain itu, acara Musda kali ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir.

"Alhamdulillah Musda berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Musda yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali memimpin DPD Partai Golkar Sidoarjo." ujar Adam Rusydi kepada republikjatim.com, Selasa (12/08/2025) malam usai Musda XI DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo.



Lebih jauh Adam Rusydi mengaku terdapat sejumlah arah kebijakan ke depan pasca terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Adam mengaku



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

berdasarkan amanah yang diberikan dalam Musda, DPD Partai Golkar Sidoarjo akan mendukung penuh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

"Selain diberi rekomendasi dari internal Musda, kita juga diberi tugas untuk merangkul kaum muda (Gen Z) untuk semakin membesarkan Partai Golkar Sidoarjo. Kita juga mendapat amanah dari pimpinan kami, untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Sidoarjo," katanya.

Ketua Panitia Musda XI DPD Partai Golkar Sidoarjo, Muhammad Samsul mengakui seluruh proses Musda ke XI DPD Partai Golkar Sidoarjo ini berjalan lancar tanpa hambatan. Karena itu,

secara keseluruhan tahapan Musda, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk mencapai keputusan aklamasi itu.

"Alhamdulillah pelaksanaan Musda berjalan sukses dan lancar tanpa kendala dan hambatan sama sekali," ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Adies Kadir berpesan agar partai berlogo pohon beringin yang telah memenangkan Paslon Subandi - Mimik Idayana ini dalam Pilkada 2024 lalu, untuk terus mendukung Pemkab Sidoarjo. Selain itu, Adies meminta agar program dan kebijakan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Sidoarjo Mimik Idayana untuk dikawal, terutama, yang menyangkut kepentingan masyarakat Sidoarjo.

"Kami minta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dikawal. Tugas ini agar Sidoarjo ini lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera dan lebih maju lagi," pinta Adies Kadir.



Adies menambahkan dalam berpartai itu yang dipegang teguh adalah pernyataan gentlemen's dan agreement. Yakni bagaimana bisa berpartai jika omongannya tidak bisa dipegang teguh kader dan pengurus partai.

"Kami berpesan kepada semua kader, kalau kita mau berpartai harus mentaati hukum dan berwatak setia kawan, jujur dan adil untuk mensejahterakan masyarakat. Nah kalau

sekarang Partai Golkar Sidoarjo sudah mampu meraih pimpinan di DPRD Sidoarjo saya juga berharap segera disiapkan dan sudah waktunya DPD Partai Golkar Sidoarjo punya perwakilan di jajaran eksekutif Pemkab Sidoarjo. Kalau tidak mampu menjadi Bupati ya minimal menjadi Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo," tegasnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan DPD Partai Golkar Sidoarjo menjadi bagian dari kekuatan politik di Kota Delta yang memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya mengajak para pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo untuk berkomitmen dan terus berkontribusi dalam pembangunan di Sidoarjo.

"Kabupaten Sidoarjo membutuhkan kader partai yang tidak hanya pandai berbicara dan hadir pada saat pemilu, melainkan kader yang setiap saat memperjuangkan kepentingan rakyat Sidoarjo. Kami mengajak kader dan pengurus Partai Golkar Sidoarjo untuk terus bersemangat dan berkolaborasi bersama partai lainnya membangun Kabupaten Sidoarjo." pungkas Subandi didampingi Wabup Sidoarjo, Mimik Idavana. Ary/Waw



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## **Kekurangan Blangko E-KTP di Sidoarjo, DPRD Desak Perbaikan Distribusi**



Anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Raymond Tara Iswahyudi. (Foto: Teddy Syah/BN.com)

**SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com** – Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa bulan terakhir membludak, namun proses pencetakan tersendat akibat keterbatasan blangko.

Anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Raymond Tara Iswahyudi, menegaskan bahwa masalah utama bukan pada pelayanan di tingkat kecamatan, melainkan ketersediaan blangko dari pemerintah pusat.

“Setelah kita telusuri dan konfirmasi ke kecamatan, ternyata blankonya yang tidak ada. Problemnnya memang ada di blangko, bukan di petugas kecamatan,” ujar Raymond Tara, Selasa (11/8/2025).



Anggota Komisi A tersebut menjelaskan, ketersediaan blanko sangat vital karena KTP masih menjadi syarat administratif di berbagai lembaga, meskipun sudah ada Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Ada beberapa lembaga kementerian yang masih mewajibkan bukti fisik KTP. Ini catatan serius bagi Dukcapil," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun DPRD, permohonan KTP online di Sidoarjo mencapai sekitar 1.200 per hari, ditambah permohonan offline sekitar 700 per hari. Namun, distribusi blanko dari Kementerian Dalam Negeri hanya sekitar 50 keping per kecamatan per bulan.

"Itu jelas tidak proporsional. Minimal harus menyesuaikan dengan jumlah permohonan," tegas Raymond.

Ia menambahkan, untuk tahun 2025 dan 2026, Kemendagri sebenarnya sudah menyediakan kuota 200.000 blanko per tahun untuk Sidoarjo. Menurutnya, kuota ini harus dimanfaatkan secara maksimal dengan pengaturan distribusi yang adil, terutama di wilayah padat penduduk seperti Waru, Taman, dan Kota Sidoarjo.

Raymond juga mengingatkan agar pengurusan KTP dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa perantara untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli).

"Dulu ada celah pungli, bahkan ada yang mematok hingga ratusan ribu. Sekarang pemerintah memberi opsi agar masyarakat bisa mengurus sendiri, baik langsung maupun lewat aplikasi. Tapi kalau blankonya tidak ada, ya tetap tidak bisa diproses," ujarnya.

Legislatif lanjut Raymond, mendorong agar regulasi dan anggaran untuk pengadaan blanko di daerah lebih siap, sembari memastikan distribusi dari pusat tidak terlambat.

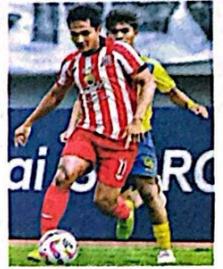
"Ini kebutuhan vital. Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan KTP hanya karena persoalan distribusi blanko," pungkasnya.

## RADAR SIDOARJO

RABU, 13 AGUSTUS 2025

HALAMAN  
10

Nasir  
Resmi  
Hengkang



ECERAN: Rp 5.000

# Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Tembus Rp 115,9 Miliar

KOTA—Jumlah tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri di Sidoarjo mencapai Rp 115,9 miliar. Data BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo mencatat, ada 126.852 peserta mandiri yang belum membayar iuran sejak 2014 hingga tahun ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Munaqib mengatakan, peserta aktif di Kota Delta saat ini tercatat 78,94 persen. Sementara proporsi peserta yang menunggak berada di angka 28 persen.

"Ada 126 ribu peserta yang menunggak dan otomatis kepesertaannya menjadi nonaktif,"



IURAN: Pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo.

ucapnya.

Menurutnya, peserta nonaktif tersebut tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Salah satu syaratnya dengan masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai APBD.

Dengan status universal health coverage (UHC) di Sidoarjo, warga yang memenuhi persyaratan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bisa berobat tanpa biaya.

Munaqib mengimbau agar peserta yang menunggak tetap mencicil kewajiban mereka. Salah satunya melalui program rehabilitasi tunggakan (rehab).

● Ke Halaman 10

RADAR  
SIDOARJO.ID

## Tunggakan Iuran BPJS...

"Peserta bisa mencicil, cicilannya kecil, tidak harus langsung lunas," jelasnya. Meski sudah masuk PBI-APBD, tunggakan kepesertaan mandiri tidak otomatis lunas.

"PBI-APBD itu pendanaan baru saat berobat kembali, tapi tunggakan lama tidak bisa dicover pemerintah," terangnya.

Baginya, mengikuti rehab cukup penting karena data penerima PBI-APBD bersifat dinamis.

Warga yang dianggap mampu bisa sewaktu-waktu dikeluarkan dari daftar penerima bantuan dan digantikan oleh warga lain yang lebih membutuhkan. "Kalau sudah tidak lagi dicover PBI, peserta tetap bisa berobat karena kepesertaannya masih aktif lewat rehab," pungkasnya. (sai/vga)

RADAR  
SIDOARJO.ID

## Gerak Jalan Meriahkan HUT RI ke-80 di Tanggulangin Berlangsung Meriah

TANGGULANGIN-Gerak Jalan Kemerdekaan Kecamatan Tanggulangin berlangsung meriah pada Selasa (12/8) siang. Ribuan peserta memadati Lapangan Desa Ganggang Panjang yang menjadi titik start pemberangkatan.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 12.30 dengan pengawasan aparat kepolisian dan panitia. Rute yang ditempuh cukup panjang, melintasi jalan-jalan desa dan pusat keramaian.

"Dari Lapangan Desa Ganggang Panjang, pe-

serta menuju simpang tiga SD Lama, berbelok ke kiri melewati Masjid Randegan, Balai Desa Ketegan, Masjid Wates hingga SDN Kedensari 1," ucap Ketua Paguyuban BPD Tanggulangin, Alvan Surjanto kepada Radar Sidoarjo.

Dari sana, rombongan bergerak lurus ke Balai Desa Kedensari lalu masuk ke Pasar Wisata Tanggulangin sebagai titik finish. Selama perjalanan, warga dan penjual jajanan berjejer di pinggir jalan.

● Ke Halaman 10



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

**ANTUSIAS: Pemberangkatan peserta pertama Gerak Jalan Kemerdekaan Kecamatan Tanggulangin.**

layouter: hadi

CS Dipindai dengan CamScanner



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Gerak Jalan...

"Seluruh unsur masyarakat sudah memeriahkan acara, ada Palang Merah St. Apolsek, Danramil dan lainnya," ujarnya.

Menurutnya, seluruh desa di Tang-

gulangin mengirimkan perwakilan. Sehingga kegiatan perayaan kemerdekaan menjadi cukup meriah. "Terdapat masyarakat dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga kelompok masyarakat seperti RT dan organisasi desa," jelasnya.

"BPD Kecamatan Tangulangin juga ikut berpartisipasi, masing-masing BPD desa menaruh perannya sendiri untuk tampil berbaris," imbuhnya.

Suasana di sepanjang rute terasa semarak dengan kibaran bendera merah putih dan atribut kemerdekaan.

Masyarakat antusias menonton jalannya lomba dari sisi jalan.

Salah satu warga, Ajeng mengaku senang menyaksikan gerak jalan. Dia datang bersama keluarganya sembari membawa camilan dan minuman agar betah berdiri di pinggir jalan.

"Kalau gerak jalan begini itu rasanya meriah sekali, semua orang keluar rumah," katanya.

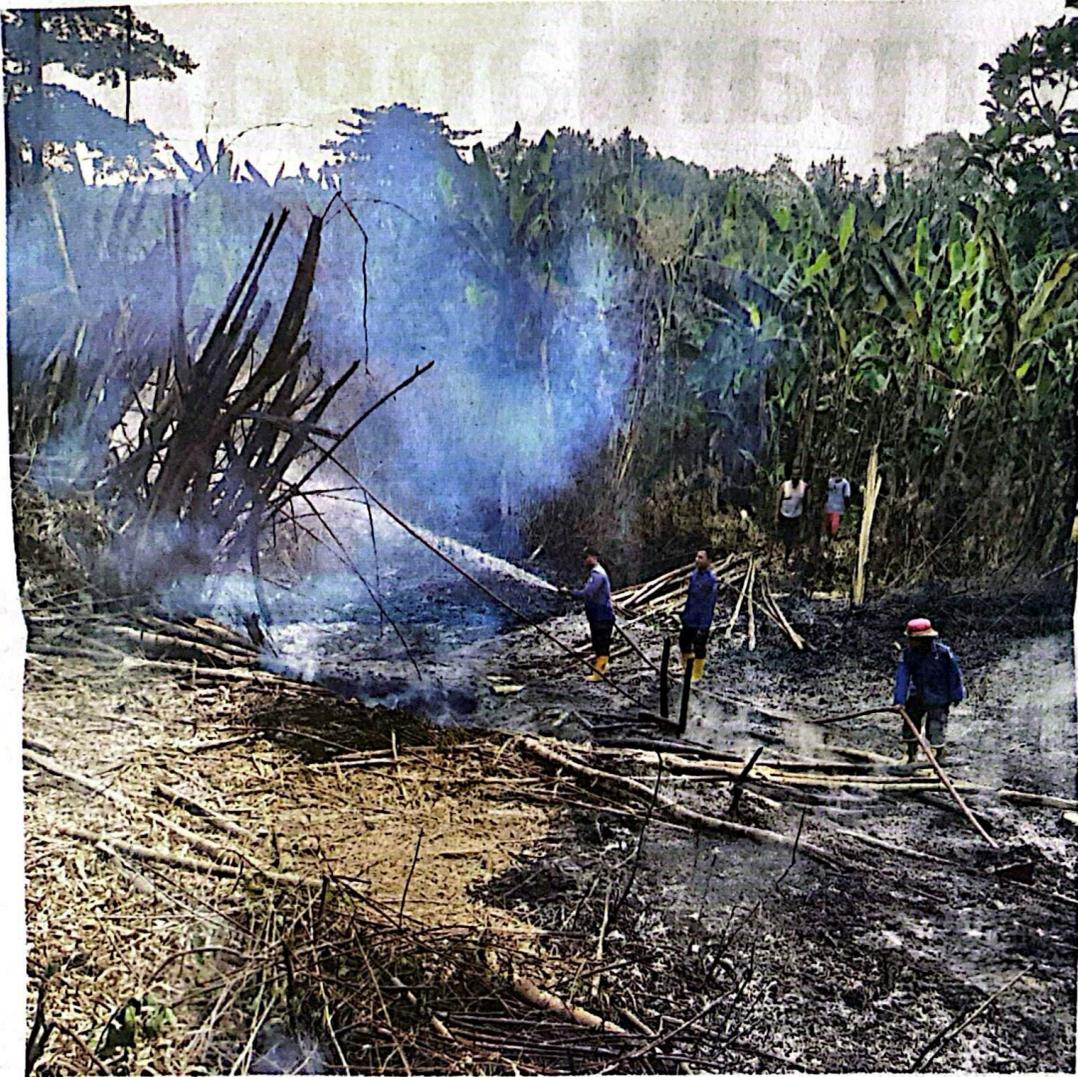
"Cukup menghibur, biasanya kan ada yang menampilkan dengan kostum-kostum yang unik, jadi seru," pungkasnya. (sai/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



BPBD SIDOARJO

**PEMBASAHAN:** Tim Damkar Pos Krian memadamkan api yang membakar area lahan bambu di Desa Tempel, Krian, Senin (11/8). Hingga kemarin (12/8), Damkar BPBD Sidoarjo menangani tiga kebakaran lahan.

## Dua Hari, Tiga Lahan Hangus Imbas Pembakaran Sampah Liar

**SIDOARJO** - Dalam dua hari, sejak Senin (11/8) hingga kemarin (12/8), sebanyak tiga lahan terbakar. Penyebabnya, sama-sama imbas adanya orang membakar sampah dan merembet ke lahan kosong.

Kemarin (12/8), lahan kosong di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, terbakar. Luasnya 500 meter. Sebelumnya, di Krian dan Waru. Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, kebakaran lahan tersebut diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah warga. "Kami menduga ada aktivitas

warga, di sisi lain angin dan musim kemarau membuang daun kering cepat terbakar," katanya.

Sedangkan pada Senin (11/8), api menghanguskan lahan bambu di Desa Tempel Krian. Api cepat membesar karena banyak batang kayu yang kering. Pada Senin (11/8) malam, kebakaran juga melanda lahan kosong di Pondok Tjandra, Waru. "Kondisi musim kemarau memang sering terjadi kebakaran lahan, kamiimbau warga agar tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan," ujarnya. (eza/uzi)

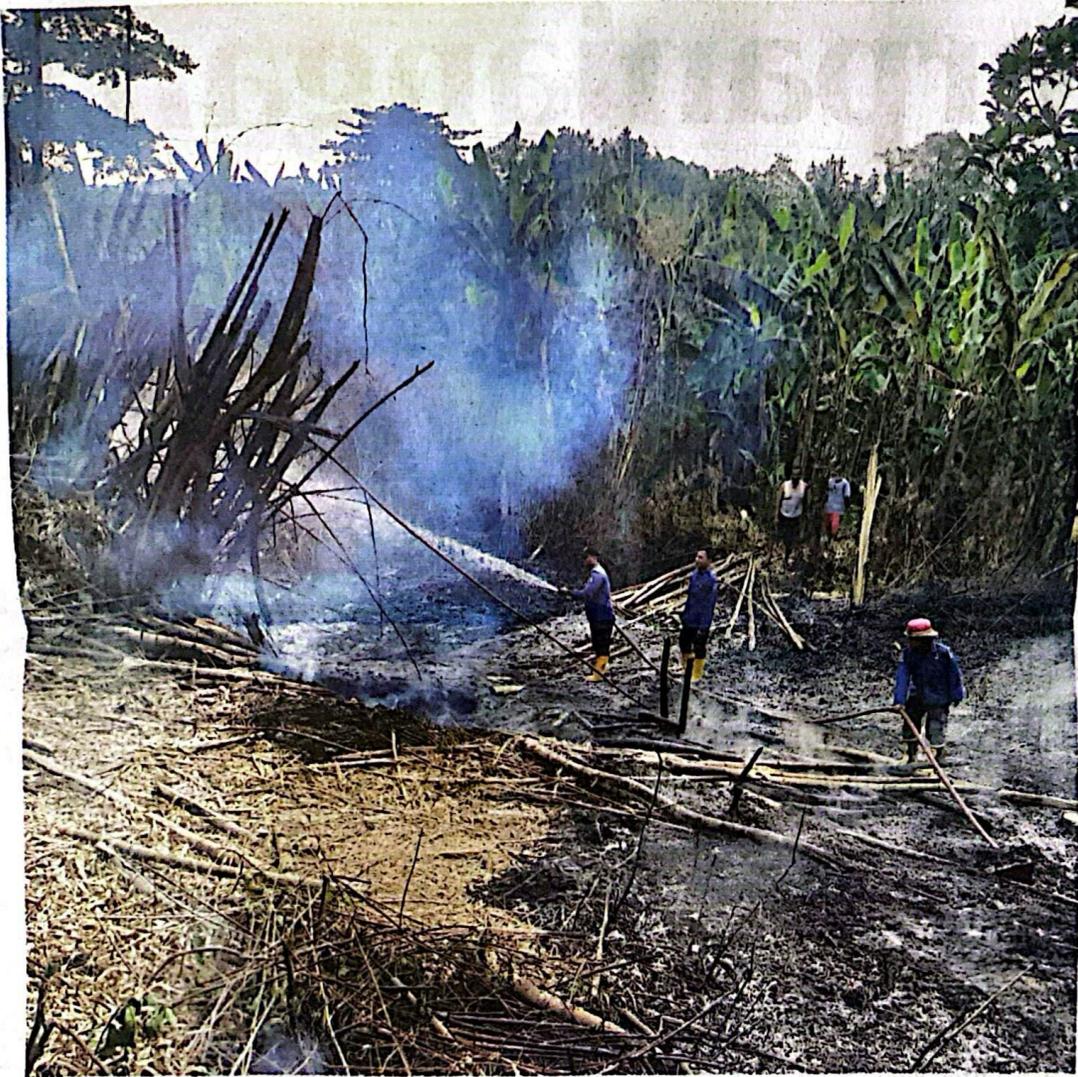
CS Dipindai dengan CamScanner

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



BPBD SIDOARJO

**PEMBASAHAN:** Tim Damkar Pos Krian memadamkan api yang membakar area lahan bambu di Desa Tempel, Krian, Senin (11/8). Hingga kemarin (12/8), Damkar BPBD Sidoarjo menangani tiga kebakaran lahan.

## Dua Hari, Tiga Lahan Hangus Imbas Pembakaran Sampah Liar

**SIDOARJO** - Dalam dua hari, sejak Senin (11/8) hingga kemarin (12/8), sebanyak tiga lahan terbakar. Penyebabnya, sama-sama imbas adanya orang membakar sampah dan merembet ke lahan kosong.

Kemarin (12/8), lahan kosong di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, terbakar. Luasnya 500 meter. Sebelumnya, di Krian dan Waru. Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, kebakaran lahan tersebut diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah warga. "Kami menduga ada aktivitas

warga, di sisi lain angin dan musim kemarau membuang daun kering cepat terbakar," katanya.

Sedangkan pada Senin (11/8), api menghanguskan lahan bambu di Desa Tempel Krian. Api cepat membesar karena banyak batang kayu yang kering. Pada Senin (11/8) malam, kebakaran juga melanda lahan kosong di Pondok Tjandra, Waru. "Kondisi musim kemarau memang sering terjadi kebakaran lahan, kami imbau warga agar tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan," ujarnya. (eza/uzi)

CS Dipindai dengan CamScanner

# Jawa Pos

## Operasional TPST Pekarungan Terkendala Anggaran Peralatan

**SIDOARJO** - Operasional tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Pekarungan yang mangkrak terkendala anggaran. Camat Sukodono Moch. Solichin sudah meminta pihak desa agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk cari solusi.

Solichin mengatakan, ke depan pihak desa sudah ada rencana untuk mengaktifkan kembali TPST tersebut. Sehingga bisa kembali beroperasi. "Selama ini mereka mengaku terkendala pembiayaan sarpras dan SDM pengelola

TPST," paparnya.

Sebelum TPST beroperasi lagi, pihak Kecamatan Sukodono akan berpatroli untuk mengangkut sampah liar di Pekarungan. "Tim nanti mengangkut seminggu sekali, sambil kami pasang larangan dan peringatan untuk tidak buang sampah liar di situ," paparnya.

Saat ini, sampah yang menumpuk di jalan sekitar TPST tersebut sudah dibersihkan. "Dari pengamatan kami kebanyakan yang membuang adalah warga luar desa, karena itu jalur alternatif ke Surabaya," ujarnya. (eza/uzi)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**MANGKRAK:** TPST Pekarungan di Kecamatan Sukodono sudah tidak beroperasi kemarin (12/8). Imbasnya, banyak sampah dibuang sembarangan.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## 10 Rumah di Buduran Dapat Jamban Sehat Gratis

**SIDOARJO** – Sebanyak 0,07 persen rumah di Sidoarjo belum dilengkapi jamban sehat. Meskipun, Sidoarjo sudah menyangand Kabupaten Kota Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS). Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) menekan angka tersebut lewat bantuan dari organisasi kesehatan dan CSR.

Kemarin (12/8) misalnya. Sebanyak 10 rumah di Buduran dipasang jamban sehat dari Rotary Club Sur-



ANGGER BONDAN/JAWA POS

baja Selatan. Kepala Dinkes Sidoarjo dr Laksmie Herawati yuwantina terus ber-

upaya mengurangi rumah yang belum memiliki jamban sehat melalui berbagai pro-

gram bantuan.

"Hari ini (kemarin) ada 10 rumah di Buduran mendapat

**SANITASI SEHAT:** Presiden Rotary Club Surabaya Selatan Maya Retno (kiri), Kepala Dinkes Sidoarjo Laksmie Herawati Yuwantina (tiga dari kanan), dan District Governor Rotary District D3420 Dyah Anggraeni (dua dari kanan) memeriksa bantuan jamban yang telah terpasang di rumah warga Siwalanpanji kemarin (12/8).

bantuan jamban sehat," katanya kemarin (12/8). Bantuan 10 jamban sehat tersebut diberikan ke rumah warga desa Siwalanpanji, Damarsih, dan Sawohan. Sementara itu, Presiden Rotary Club Surabaya Selatan Maya Retno mengatakan, bantuan diberikan berdasarkan data Dinkes terkait rumah yang belum memiliki jamban sehat. "Sebelumnya, rumah-rumah ini membuang kotoran langsung ke sungai. Beberapa sudah terpasang jambannya," ujarnya. (eza/uzi)

# Jawa Pos

## Bus Trans Jatim 2 Hari Gratis

### ► Berlaku di Semua Koridor Sambut HUT Kemerdekaan RI

**SURABAYA, SURYA** - Pemprov Jatim memberi kado spesial di momen peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama dua hari penuh, pada 17-18 Agustus 2025, seluruh masyarakat yang memanfaatkan layanan bus Trans Jatim dibebaskan dari biaya.

Kepala Dinas Perhubungan

an Provinsi Jawa Timur Nyono, menyatakan program ini khusus digelar menyambut peringatan hari kemerdekaan sekaligus hadiah bagi warga Jatim pengguna Bus Trans Jatim.

"Selama dua hari penuh, layanan bus Trans Jatim gratis untuk semua koridor. Ini adalah inisiatif dari Ibu

Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar pengguna bus Trans Jatim gratis tanpa syarat apapun selama dua hari penuh," kata Nyono, Selasa (12/8).

Gratis tarif layanan Bus Trans Jatim diberlakukan di semua koridor kecuali layanan Bus Trans Jatim Luxury. Sebagaimana diketahui, se-

jauh ini total ada enam koridor bus Trans Jatim. Koridor I bus Trans Jatim melayani rute Porong Sidoarjo-Purabaya Surabaya-Bunder Gresik.

Koridor II melayani rute Kertajaya Mojokerto-Purabaya Surabaya, Koridor III melayani rute Kertajaya Mojokerto-Bunder Gresik. Selain itu Koridor IV melayani rute

Bunder Gresik-Paciran Lamongan, dan Koridor V melayani rute Surabaya Surabaya-Terminal Bangkalan, dan Koridor VI melayani rute Kertajaya Mojokerto-Porong Sidoarjo.

Sedangkan Bus Trans Ja-

luxury melayani rute Terminal Bunder Gresik - Terminal Porong Sidoarjo. Berfasilitas lebih nyaman, layanan bus ini lebih mahal dibanding bus Trans Jatim lainnya.

"Selain bus trans Jatim luxury kami pastikan gratis tanpa tarif. Maka manfaatkan layanan ini, rayakan kemerdekaan RI bersama Bus Trans Jatim," jelas Nyono. (fa)



GRATIS 2 HARI. Pemprov Jatim memberi kado spesial di momen peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama dua hari penuh, pada 17-18 Agustus 2025

**PENGUMUMAN**

**PENG-34/SEKL/2025**  
**PEMBAYARAN ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PT BPR DWICAHAYA NUSAPERKASA (DL)**

- Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (DL), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS ("UU LPS") sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
- Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan secara bertahap. Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal **28 November 2025**.
- Pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai penetapan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini, akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.
- Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut, yaitu s.d. tanggal **23 Juli 2030**.
- LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (DL) yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. Selanjutnya, syarat, dokumen, dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS dengan akses website LPS di <https://www.lps.go.id/>.
- Pembayaran kedua klaim Penjaminan simpanan Nasabah Penyimpan PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (DL) oleh Bank Pembayar dilakukan mulai **Rabu tanggal 13 Agustus 2025**.
- Pelayanan pengajuan klaim Penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai Simpanan layak dibayar dilaksanakan melalui: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Bank Pembayar	Alamat
BRI Unit Junrejo	Jl. Raya Dadaprejo No.148, Batu, Malang
- Nasabah penyimpan yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status penjaminan simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan penetapan status penjaminan simpanan diumumkan, dalam hal ini batas waktu pengajuan keberatan kepada LPS selambat-lambatnya tanggal **8 Februari 2026**. Adapun prosedur pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS dapat dilihat pada website LPS.
- Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: [informasi@lps.go.id](mailto:informasi@lps.go.id)

Demikian agar maklum.

13 Agustus 2025  
Sekretaris Lembaga





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## SMP IT Insan Kamil Sidoarjo Siap Menjadi Sekolah Adiwiyata

**Sidoarjo, Bhirawa**

Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Insan Kamil Sidoarjo siap untuk menjadi sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo. Selasa (12/8) kemarin, tim penilai Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, datang ke sekolah yang berada di jalan Pecantingan RT 12 RW 02 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo.

Kepala SMP IT Insan Kamil, Fathur Rohman Spd I, Gr, mengatakan semua jajaran di SMP IT Insan Kamil Sidoarjo menyatakan siap menjadi dan akan melaksanakan program-program sekolah Adiwiyata. "Karena program ini jelas bermanfaat bagi sekolah maupun para semua siswa," komentar Fathur Rohman.

Tim penilai sekolah Adiwiyata dari DLHK Kabupaten Sidoarjo, kemarin, mencocokkan dokumen program sekolah Adiwiyata yang diajukan, dengan kondisi di lapangan. Tim penilai melihat lingkungan SMP IT Insan Kamil dan sekitarnya. Misalnya fasilitas tempat sampah, fasilitas biopori, kondisi kamar kecil para siswa, rumah hijau dan kebun tanaman yang tersedia.

Staf Direktur Pendidikan Ya-

nyasan Insan Kamil, Ani Qotul Ubbah MPd, Gr, menyampaikan kedatangan para tim penilai sekolah Adiwiyata dari DLHK Sidoarjo, dianggap menjadi penyemangat, untuk melakukan aksi-aksi dalam bersih-bersih lingkungan.

"Supaya lingkungan sekolah semakin menjadi asri, nyaman dan sehat bagi semua warga sekolah. Dan siswa pun jelas senang bisa belajar di lingkungan sekolah yang bersih," katanya disela-sela mendampingi tim penilai sekolah Adiwiyata dari DLHK Sidoarjo. Kedatangan tim penilai sekolah Adiwiyata ke sekolah yang sudah terakreditasi A ini, menurut Ani, akan semakin menguatkan memotivasi jajaran di SMP Insan Kamil, untuk bisa menjadi sekolah Adiwiyata.

Misalnya anak-anak dilatih dengan aksi memilah-milah sampah dan melatih anak-anak agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya. "Ini menjadi pekerja rumah bagi kita," katanya bersemangat. Tentang tabung biopori, yang dipasang di sekolah ini, menurut Ani telah dipasang ada di 50 titik di halaman sekolah tersebut. Kedalaman tiap titik, rata-rata sekitar 30 cm.

Alat biopori ini dipasang untuk bisa menyerap genangan air pada saat hujan. Sehingga air cepat surut dan tidak sampai ada genangan air. Bahkan di dalam tabung biopori ini, kata Ani bisa dimasukkan sampah-sampah basah, sehingga nantinya akan bisa berubah menjadi kompos.

Salah satu tim penilai program sekolah Adiwiyata dari DLHK Sidoarjo, Tri Wijayanti, mengatakan bila penilaian dokumen dianggap telah mendapat hasil 70,

maka wajib dilanjut untuk penilaian di lapangan. "Tim penilai perlu mencocokkan dokumen, apa data dan fakta di lapangan memang cocok?," ujarnya dalam kesempatan itu. Menurut dirinya ikut dalam program sekolah Adiwiyata manfaatnya diantaranya adalah baik bagi sekolah, siswa, masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Dengan menjadi sekolah Adiwiyata, maka lingkungan sekolah menjadi bersih, sehat dan nyaman. [kus.wwn]



alikusyanto/bhirawa

Tim penilai sekolah Adiwiyata dari DLHK Kabupaten Sidoarjo datang ke SMP IT Insan Kamil Sidoarjo melakukan Monitoring dan evaluasi.

HARIAN  
**Bhirawa**  
Mata Jajap Bhiru Sejahtera



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## KILAS BIROKRASI

### Kabupaten Sidoarjo dapat Anugerah KLA Kategori Utama Tahun 2025

#### Sidoarjo, Bhirawa

Kabupaten Sidoarjo baru di tahun 2025 ini berhasil mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak (KLA) kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi kepada Bupati Sidoarjo Subandi, pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Jumat (8/8) akhir pekan lalu di Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2025 ini menganugerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada 355 Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama.

Bupati Subandi mengatakan pencapaian KLA peringkat Utama ini merupakan peningkatan signifikan dari raihan sebelumnya, yaitu di tingkat Nindya.

Dirinya menyatakan rasa syukur dan bangga atas lompatan prestasi tersebut. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi komprehensif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Karena telah diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

“Alhamdulillah. Kabupaten Sidoarjo berhasil naik ke tingkat Utama KLA,” komentarnya. [kus.dre]

HARIAN  
**Bhirawa**  
Halo Sidoarjo, Halo Sidoarjo